



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS (LPT) TAHUN 2021

KECAMATAN JATEN



KECAMATAN JATEN

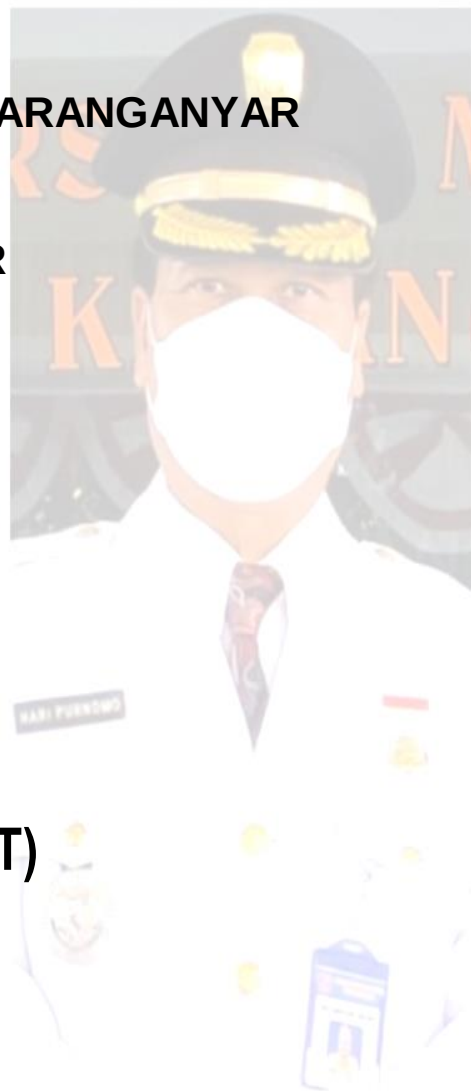


Kabupaten Karanganyar

Jalan Raya Jaten No. 85, Jaten Telp/ Fax.(0271) 821319,
[Www. Jaten.karanganyarkab.go.id](http://Www.Jaten.karanganyarkab.go.id)
KABUPATEN KARANGANYAR



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS (LPT)
TAHUN 2021
KECAMATAN JATEN**



Jl. Raya Jaten No. 85, Karanganyar
Telp. (0271) 821319 Fax.(0271) 821319
Website. www.jaten.karanganyarkab.go.id, email:
jaten@karanganyarkab.go.id
KARANGANYAR

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr, Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Kecamatan Jaten Tahun 2021. Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan OPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021. Laporan pelaksanaan tugas (LPT) ini bertujuan untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Pelaksanaan Tugas adalah laporan yang disusun oleh OPD untuk melaporkan hasil kinerjanya selama satu tahun, laporan ini disusun agar dapat diketahui hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga mempermudah untuk menentukan arah kebijaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun berikutnya.

Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Karanganyar, Januari 2022

CAMAT JATEN

ttd

HARI PURNOMO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19670525 198811 1 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB II DISKRIPSI KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR	
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
B. JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH OPD.....	4
C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KECAMATAN JATEN	4
D. PERDA/PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
F. KEPEGAWAIAN.....	7
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	10
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR.....	10
C. URUSAN PILIHAN.....	10
D. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG.....	10
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	11
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR.....	11
C. URUSAN PILIHAN.....	11
D. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG.....	11
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
V.1 TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH (PEMERINTAH PUSAT) YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN.....	20

V.2 TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN	20
V.3 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA	20
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
A. URUSAN PENDIDIKAN.....	21
B. URUSAN KESEHATAN.....	21
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	21
D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	21
E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	21
F. URUSAN SOSIAL.....	21
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN.....	22
BAB VII P E N U T U P.....	23

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang.

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Lawu Timur Nomor.85, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 821319, email. jaten@karanganyarkab.go.id, website.jaten.karanganyarkab.go.id.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kranganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor129);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Peeangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) adalah harapan untuk mencapai program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah direncanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Kepala OPD merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan OPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021. Laporan pelaksanaan tugas (LPT) ini bertujuan untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor. 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jaten dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Kecamatan Jaten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, pada tahun anggaran 2021 adalah NIHIL.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pelayanan tugasnya selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kecamatan Jaten merupakan koordinator bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- 1) SOP Pengajuan Cuti
- 2) SOP Pengajuan Pensiun
- 3) SOP Surat Keluar
- 4) SOP Surat Masuk
- 5) SOP SKP
- 6) SOP Paten
- 7) SOP Penyusunan RKA

- 8) SOP Penyusunan DPA
- 9) SOP Pengajuan SPP dan SPM
- 10) SOP Piket Kantor Kecamatan
- 11) SOP Pelayanan ADMINDUK
- 12) SOP Kegiatan Pelayanan Dispensasi Nikah
- 13) SOP Kegiatan Pendataan Ulang KK Miskin
- 14) SOP Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial
- 15) SOP Surat Keterangan Tidak Mampu

D. PERATURAN DAERAH / PERATURAN BUPATI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

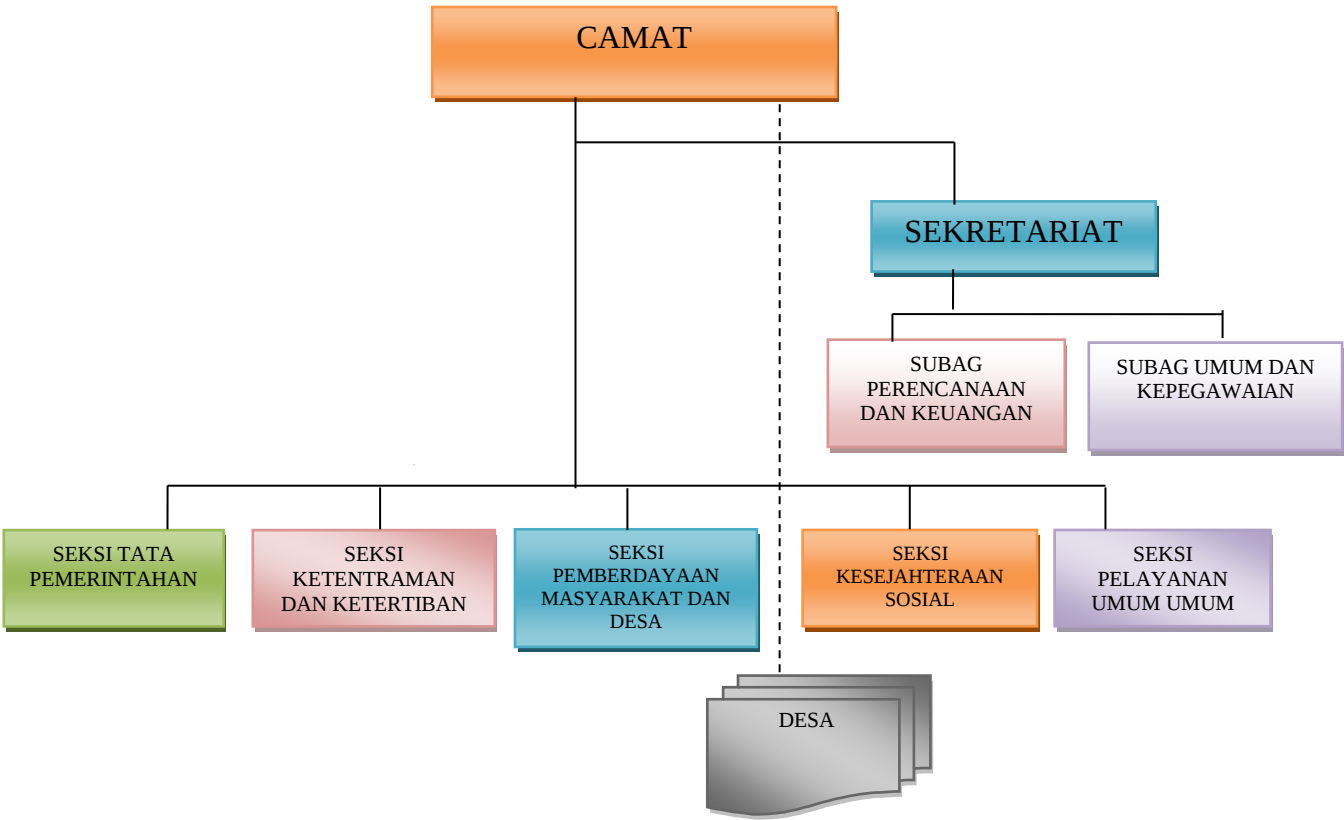
, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021, berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kranganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor129);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Peeangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

- 7. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten tahun 2021 Nomor 7);
- 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83);

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor. 117 Tahun 2016, struktur organisasi Kecamatan Jaten adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

F. KEPEGAWAIAN

Data kepegawaian Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1). Daftar Pegawai Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT/ GOL
1	Hari Purnomo, S.Sos, M.Si	19670525 198811 1 002	PNS	Pembina (IV/a)
2	Bagus Tri Sarjono, S.T.P, M.Si	19650412 198811 1 001	PNS	Pembina (IV/a)
3	Lili Setijawati P, SSn, MM	19680915 199403 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
4	Ismi Praptini, S.Sos	19640210 199102 2 002	PNS	Penata Tk.I (III/d)
5	Tartono,SE,MM	19660920 199110 1 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
6	Putut Wibowo, SE, MM	19671216 199103 1 006	PNS	Penata Tk. I (III/d)
7	Pardiyoko	19650115 198603 1 011	PNS	Penata Tk.I (III/d)
8	Erna Tri Astuti,SH	19661012 198607 2 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
9	Eni Kristiani W., SE,MM	19810616 200604 2 009	PNS	Penata Tk.I (III/d)
10	Sumantri,S.Sos	19761122 199703 1 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
11	Dyah Antari R ,S.Sos	19700109 199301 2 001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
12	Melania Kusprihatin, SE, MM	19781231 200902 2 010	PNS	Penata Tk.I (III/d)
13	Giyanto	19681010 199401 1 002	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
14	Susmiyati,A.Md	19720209 201001 2 002	PNS	Penata Muda (III/a)
15	Sriyono	19621209 200701 1 004	PNS	Pengatur Tk. I (II/d)
16	Jayadi	19650112 200701 1 023	PNS	Pengatur Tk. I (II/d)
17	Warsino	19650520 198612 1 001	PNS	Pengatur Muda Tk I (II/b)
18	Pinggir Wiyono	19690808 200901 1 006	PNS	Pengatur Muda Tk I (II/b)

2). Daftar Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

5) Daftar Pejabat Fungsional Umum Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	Sumantri,S.Sos	197611221299703 1 001	Pengelola Administrasi Pemerintahan
2	Dyah Antari R ,S.Sos	19700109 199301 2 001	Pengadministrasi Umum
3	Melania Kusprihatin, SE, MM	19781231 200902 2 010	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	Giyanto	19681010 199401 1 002	Petugas Keamanan
5	Susmiyati,A.Md	19720209 201001 2 002	Bendahara Pengeluaran
6	Sriyono	19621209 200701 1 004	Pengelola Administrasi Pemerintahan
7	Jayadi	19650112 200701 1 023	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
8	Warsino	19650520 198612 1 001	Pelaksana
9	Pinggir Wiyono	19690808 200901 1 006	Pramu Kebersihan

6) Daftar Pejabat Fungsional Umum Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS
		NIHIL	

7) Daftar Pejabat Fungsional Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Yang Belum Terisi (umum/khusus)

NO	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
1	Pengelola Ketertiban	2
2	Pengelola Pelayanan Umum	2
3	Pengelola Kesejahteraan Sosial	2
4	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1
5	Pengelola Kepegawaian	1

BAB III**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH****A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***Nihil***B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR***Nihil***C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 1.573.600,00 Realisasi: Rp. 1.573.600,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 1.873.400,00 Realisasi: Rp. 1.533.400,00 Persentase:	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				(81,85%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.888.352.000,00 Realisasi: Rp. 1.861.548.548,00 Persentase: (98,58%)	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		
			c. Administrasi Umum	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 5.441.000,00 Realisasi: Rp. 5.441.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 4.990.000,00 Realisasi: Rp. 4.176.500,00 Persentase: (83,70%)	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 7.110.000,00 Realisasi: Rp. 6.186.000,00 Persentase: (87,00%)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 35.110.000,00 Realisasi: Rp. 32.884.000,00 Persentase: (93,66%)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan, Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan, 12 bulan (100.00%)		
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 43.300.000,00 Realisasi: Rp. 40.900.000,00 Persentase: (94,46%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia 1 unit LCD proyektor, 3 unit AC, 2 unit printer, 1 unit laptop	1 unit LCD proyektor, 3 unit AC, 2 unit printer, 1 unit laptop (100.00%)		
				2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 20.702.000,00 Realisasi: Rp. 18.888.000,00 Persentase:	Jumlah tempat parkir yang tersedia 1 lokasi	1 lokasi (100.00%)		

				(91,24%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 15.420.000,00 Realisasi: Rp. 15.420.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 39.400.000,00 Realisasi: Rp. 36.459.671,00 Persentase: (92,54%)	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 56.182.200,00 Realisasi: Rp. 55.762.200,00 Persentase: (99,25%)	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 26.454.000,00 Realisasi: Rp. 19.158.412,00 Persentase:	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan 1 mobil, 3 sepeda	1 mobil, 3 sepeda motor (100.00%)		

				(72,42%)	motor			
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 19.780.000,00 Realisasi: Rp. 18.765.000,00 Persentase: (94,87%)	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 lokasi	1 lokasi (100.00%)		
			g. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran: Rp. 6.042.800,00 Realisasi: Rp. 5.372.800,00 Persentase: (88,91%)	Jumlah fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan legalisasi dokumen 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			h. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 62.675.900,00	Jumlah pembinaan wilayah dan linmas desa 8 desa	8 desa (100.00%)		

				Realisasi: Rp. 58.846.500,00 Persentase: (93,89%)				
			i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K Anggaran: Rp. 9.100.000,00 Realisasi: Rp. 8.725.000,00 Persentase: (95,88%)	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan 8 desa	8 desa (100.00%)		
				2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 12.549.200,00 Realisasi: Rp. 12.017.200,00 Persentase: (95,76%)	Jumlah pembinaan FKUB dan kegiatan keagamaan serta sosial budaya lainnya 8 desa	8 desa (100.00%)		

			j. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 11.846.200,00 Realisasi: Rp. 11.639.200,00 Persentase: (98,25%)	jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan desa 8 desa	8 desa (100.00%)		
				2) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 7.192.600,00 Realisasi: Rp. 6.892.600,00 Persentase: (95,83%)	Jumlah fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa 8 desa	8 desa (100.00%)		
				3) Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Anggaran: Rp. 7.958.300,00 Realisasi: Rp. 7.908.300,00 Persentase: (99,37%)	Jumlah fasilitas pelaksanaan musrenbang 8 desa	8 desa (100.00%)		
				4) Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Anggaran: Rp. 9.438.800,00 Realisasi:	Jumlah pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya 8 desa	8 desa (100.00%)		

				Rp. 9.438.800,00 Persentase: (100,00%)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan dan penugasan meliputi tugas yang diterima dan tugas yang diberikan. Tugas yang diterima meliputi tugas yang diterima dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, sedangkan tugas yang diberikan meliputi tugas yang diberikan kepada desa. Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas pembantuan dan penugasana di Kecamatan Jaten pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

V.1.Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

NIHIL

V.2.Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

NIHIL

V.3 Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Desa

NIHIL

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

Kecamatan Jaten merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bekerja pada bidang yang vital seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial sehingga untuk penerapan dan pencapaian standar layanan minimal tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PENDIDIKAN

Nihil

B. URUSAN KESEHATAN

Nihil

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Nihil

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Nihil

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Nihil

F. URUSAN SOSIAL

Nihil

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Juara 4 Penilaian Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Karanganyar

BAB VIII PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang mengemban tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam program kerja dan kegiatan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.300.492.000,- (*dua milyar tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.236.490.000,- (*Dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 64.002.000,- (*Enam puluh empat juta dua ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.247.536.731,- (*dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 97,70%, sisa anggaran Rp. 52.955.269,- (*Lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 2,30%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.187.748.731,- (*Dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 97,82% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 48.741.269,- (*empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 2,18%, sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 59.788.000,- (*lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) atau sebesar 93,42% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.214.000,- (*empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah*) atau sebesar 6,58%.

2. SARAN

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sesuai dengan tugasnya sebagai koodinator penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, maka Kecamatan Jaten hendaknya selalu mengupayakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai salah satu badan publik, Kecamatan Jaten sebaiknya mengupayakan peningkatan kualitas dalam hal fasilitas yang dipergunakan sebagai sarana pelayanan dan kapasitas aparatur pelayanan. Hal ini juga perlu di dukung oleh Pemerintah Kabupaten sehingga pelayanan di tingkat kecamatan yang selalu bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dapat meningkat secara signifikan sehingga upaya dalam mewujudkan *good services* dan *good goverment* bisa segera terwujud.